

Dana Desa dan Respon Masyarakat Terhadap Manfaatnya di Nagari Sungai Tarab

Hanifa Fadilla, Suryanef

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: hanifafadilla1@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Tarab, respon masyarakat terhadap manfaat dana desa di Nagari Sungai Tarab, dan permasalahan apa yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Tarab. Penelitian ini dilakukan di nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diolah secara deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah tokoh masyarakat, kepala desa serta masyarakat Nagari Sungai Tarab. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data melalui tiga alur kegiatan yaitu mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan dengan melakukan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dana desa di Nagari Sungai Tarab masih mengalami beberapa kendala dalam penyalurannya seperti terlambatnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditambah dengan masih rendahnya swadaya masyarakat yang kurang terhadap pembangunan yang sudah dibuat, kurangnya informasi langsung kepada masyarakat mengenai transparansi penggunaan dana desa, pemanfaatan yang lebih kepada bidang pembangunan, kurang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang kurang dalam mengelola dana desa.

Kata Kunci: *pengelolaan, Dana Desa, pemerintah Nagari*

ABSTRACT

This article aims at describing the management mechanisms of village funds in Nagari Sungai Tarab, public's response to the benefits of village funds and describing what problems are found in the management of village funds in Nagari Sungai Tarab. This research was conducted in the Nagari Sungai Tarab, sub-district Sungai Tarab. The method of research is conducted through a qualitative and descriptive approach by using the primary and secondary data that is processed in a qualitative descriptive. The research informant is a public figure, neighbourhood and also a citizen of Nagari Sungai Tarab. The technique of collecting data on this research uses interviews and doctoral studies. Test the validity of data using the data triangulation technique. Data analysis techniques through three threads of activity is reducing data, display data and draw conclusions with verification. The results of the study

showed that village funds in Nagari Sungai Tarab still experienced some obstacles in its distribution such as the delay of development planning deliberation of the lack of non-governmental community that is less on development That has been made, the lack of direct information to the public about the transparency of the use of village funds, utilization of more to the field of development, less in improving the community economy, coupled with the lack of resources People when managing village funds.

Keywords: *management, village funds, local government*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2020 by author.

Received: Jul 15 2019

Revised: Sep 9 2019

Accepted: Sep 17 2019

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai dana desa sekarang ini menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan di semua kalangan. Dimana untuk melihat bagaimana suatu pemerintah desa atau nagari dalam membentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disebabkan semenjak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya dari APBN desa juga memperoleh dana dari sumber pendapatan lainnya, besarnya meningkat setiap tahun sehingga sekarang rata-rata desa mengelola ± 1 Miliar. Prioritas penggunaan dana desa terdapat dalam 2 bentuk program kegiatan diantaranya pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sujarto (1985:12) aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya. Menurut

B.S Muljana (2001:3) pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Menurut Susantyo (2007:5) pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas.

Begitu banyaknya dana desa yang harus dikelola serta tidak adanya mekanisme check and balance akan membuka potensi korupsi oleh eksekutif desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah

menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015 sampai 2018 dana desa yang diberikan terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar \pm 800 juta. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai rincian dana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018. Selain itu, jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan melalui proses pemekaran nagari yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap desa.

Tabel 1

Rincian Dana Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018

Rincian Alokasi	2015	2016	2017	2018
ADD (Alokasi Dana Desa)	855,51	917,06	914,38	898,59
Bagi Hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	28,56	27,56	30,18	30,39
Dana Desa	267	598,64	796,54	790,08
Jumlah Desa	880	880	928	928
Rata-rata Pendapatan Per Desa	1,308 M	1,754 M	1,876 M	1,852 M
Rata-rata Dana Desa Per Desa	303,4 juta	680,3 juta	858,3 juta	851,4 juta

www.djpk.kemenkeu.go.id

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berhasil dalam pelaksanaan pembinaan keuangan desa melalui Perbup Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, Perbup Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Tanah Datar sampai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017. Pada tahun 2017, Kabupaten Tanah Datar mendapatkan alokasi dasar sebesar Rp.54.033.150 juta dan alokasi formula sebesar Rp.8.430.022 juta seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Ju
			Per Desa	Per Kab/Kota		
1	Kab. Limapuluh Kota	79	720.442	56.914.918	10.956.200	67.8
2	Kab. Agam	82	720.442	59.076.244	11.695.607	70.7
3	Kab. Kepulauan Mentawai	43	720.442	30.979.006	10.640.393	41.0
4	Kab. Padang Pariaman	103	720.442	74.205.526	10.439.202	84.6
5	Kab. Pasaman	37	720.442	26.656.354	9.294.457	35.9
6	Kab. Pesisir Selatan	182	720.442	131.120.444	12.785.510	143.7
7	Kab. Sijunjung	61	720.442	43.546.562	7.682.966	51.6
8	Kab. Solok	74	720.442	53.321.708	10.769.430	64.0
9	Kab. Tanah Datar	75	720.442	54.033.150	8.430.022	62.4
10	Kota Sawah Lunto	27	720.442	19.451.934	4.213.927	23.6
11	Kota Pariaman	55	720.442	39.624.310	4.524.363	44.1
12	Kab. Pasaman Barat	19	720.442	13.688.393	11.564.985	25.2
13	Kab. Dharmasraya	52	720.442	37.462.984	7.635.247	45.0
14	Kab. Solok Selatan	39	720.442	28.097.233	7.329.886	35.4
	Total Sumatera Barat	928	720.442	668.570.176	127.968.795	796.7

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Nagari Sungai Tarab adalah salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa sejak tahun 2015 guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan terhadap masyarakat. Dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut seperti bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Pengelolaan keuangan dana desa di nagari Sungai Tarab masih belum mencukupi kebutuhan masing-masing jorong. Serta adanya prokontra di tengah masyarakat terhadap manfaat dana desa yang terlihat lebih kearah pelaksanaan pembangunan nagari jika dibandingkan dengan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan banyaknya dana yang dihabiskan dalam bidang pembangunan. Berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris Nagari Sungai Tarab Syufrihadi

mengatakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat tidak seberapa yang dijalankan oleh nagari, disebabkan wilayah nagari Sungai Tarab ini lebih luas jika dibandingkan dengan nagari lain. Selain itu jumlah kader yang memberikan penyuluhan di bidang pemberdayaan masyarakat juga masih kurang (tanggal 28 Mei 2019)."

Dalam hal perencanaan penggunaan dana desa, sering terjadi keterlambatan dan masyarakat di tingkat jorong hanya sedikit yang menghadiri musyawarah perencanaan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi alokasi dana desa dan tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari yang menggunakan dana desa. Penerimaan dana desa di Nagari Sungai Tarab tahun 2018 mengalami pengurangan sehingga mengakibatkan munculnya kendala baru. Dalam setiap proses pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban harus sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan paparan permasalahan diatas jelas bahwa masih ada permasalahan terkait dengan pengelolaan dana desa dan respon masyarakat terhadap manfaat dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian diantaranya tokoh masyarakat, kepala desa dan

masyarakat Nagari Sungai Tarab. Informan diharapkan yang paham dan terkait langsung dengan permasalahan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil suatu penelitian. Metode triangulasi menurut Sugiyono (2012: 125) adalah metode yang menggecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang membandingkan hasil wawancara dengan informan, dengan kondisi riil di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang diawali dengan tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kemudian menurut PP No. 8 Tahun 2016 tentang dana desa Pasal 1 ayat 2 menyatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa terbagi dalam 2 (dua) bentuk program diantaranya:

1) Pembangunan Fisik

Merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi-segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Menurut B.S Muljana (2001: 3) pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan fisik haruslah menggunakan sumber daya alam yang terdapat di masing-masing daerah.

Tabel 3

Daftar Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

No.	Jenis Prasarana	Volume	Jumlah Dan
1	Rabat Beton dan Pemasangan TPT jalan Binuang ke Luak Gadang	175 M	35.308.410
2	Rabat Beton dan Pemasangan TPT Jalan Usaha Tani Biaro	125 m	90.450.700
3	Rabat Beton dan Pemasangan TPT Jalan Sebelah Air ke Pantau		105.197.000
4	Pencoran Jalan Subarang ke Ateh Luang		54.838.700
5	Rabat Beton dan Pemasangan TPT Jalan Batu tagak	205 M	91.316.500
6	Rabat beton dan Pemasangan TPT Jalan Luak Godang ke Pandam	175 M	58.826.416
7	Rabat Beton dan Pemasangan TPT Jalan Melayu ke Mandahiliang		60.908.700
8	Rabat Beton Pemasangan TPT Jalan Bulaan		31.183.700
9	Lanjutan Pencoran Jalan Kincia Kopi	50 M	4.762.000
10	Irigasi Bandar Sawah	250 M	68.109.300
			261.692.911

Sumber: Data base Nagari Sungai Tarab

Terkait dengan tabel 3 di atas, terlihat bahwa prioritas penggunaan dana desa di Nagari Sungai Tarab lebih mengarah kepada pembangunan fisik atau infrastruktur yang berperan penting dalam penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Sungai Tarab menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih banyak diperuntukkan

bagi pembangunan fisik jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat dari realisasi pembangunan pencoran Jalan Ladang Koto, Pendaman Jalan Binuang, jalan ateh Guguak, jalan gang parak gatah, jalan usaha tani Bodi dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Tarab juga mempertimbangkan hal-hal seperti dana yang ada, waktu pelaksanaan, lokasi, keuntungan dan daya guna untuk masyarakat Nagari Sungai Tarab. Diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun tersebut agar bisa tahan lama.

2) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Menurut Sujarto (2007:5) pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.

Tabel 4 Daftar Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Jumlah Dana
1	Pelatihan Industri Rumah Tangga	1 paket	9.616.000
2	Pelatihan Kader Tekhnis	1 paket	10.350.000
3	Pelatihan perbengkelan	1 paket	73.509.704
4	Sosialisasi Posyantek	1 paket	4.817.200
5	Pelatihan Dasa Wisma	1 paket	Silfa
6	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	1 paket	Silfa
7	Pelatihan Manajemen dakwah remaja mesjid	1 paket	Silfa
8	Lanjutan pelatihan khatib jumat	1 paket	6.124.000
9	Pelatihan Pengelola BUMNag	1 paket	11.000.000
10	Sosialisasi Nagari Sehat	1 paket	2.689.000.
11	Penyertaan Modal BUMNag	1 paket	100.000.000
	Jumlah		218.105.904

Sumber: Data base Nagari Sungai Tarab

Terkait dengan tabel 4 diatas, terlihat bahwa Pemerintah nagari Sungai Tarab melalui penggunaan dana desa telah menganggarkan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat nagari agar melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah nagari masih ada yang tidak terjalankan atau disentuh nagari yang disebabkan karena kekurangan ahli dalam pemberian pelatihan dan kondisi geografis yang cukup luas dibanding nagari lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang diawali dengan tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Tarab berpedoman

pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2015.

Gambaran umum pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas agar bisa memajukan desa serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat lima tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Terkait dengan pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Tarab masih mengalami beberapa kendala diantaranya dalam tahap perencanaan, yang dimulai dengan musyawarah Jorong yang dilakukan di masing-masing jorong di Nagari Sungai Tarab masih banyak masyarakat yang tidak hadir. Kemudian pelaksanaan Musrembang hanya mengundang lembaga unsur pemerintah, tokoh masyarakat dengan memberi uang transpor, makan dan minum. Tahap pelaksanaan, akan sukses apabila suatu nagari memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan menguasai sistem dalam pengimputan data penggunaan dana desa. Namun Nagari Sungai Tarab masih kurang ahli dalam teknis hanya berdasarkan perkiraan saja.

Pada tahap penatausahaan, bendahara adalah bagian terpenting dalam pengurusan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan

melakukan tutup buku setiap akhir bulan serta mempertanggung jawabkan semua penerimaan pendapatan nagari dan besaran pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Tarab belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah nagari belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa langsung dilaporkan oleh Wali Nagari Sungai Tarab kepada Bupati dan bersifat mutlak. Terkait dengan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak diinformasikan kepada masyarakat.

Respon Masyarakat Terhadap Manfaat Dana Desa Di Nagari Sungai Tarab

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah prioritas yang jelas dari penggunaan dana desa guna untuk mewujudkan desa atau nagari menjadi mandiri dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat berbagai tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap manfaat dari dana desa. Nagari Sungai Tarab telah

menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan dengan semaksimal mungkin. Terkait dengan respon manfaat beberapa kalangan yang mengatakan bermanfaat dalam bidang pembangunan infrastruktur dimana terdapat respon yang baik terhadap bidang pembangunan karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya infrastruktur yang mempermudah akses keluar masuk kampung dan aktifitas sehari-hari masyarakat secara umum seperti pembuatan irigasi bandar sawah, pembuatan jalan usaha tani, pencoran dan pendaman jalan. Namun berbanding terbalik dengan bidang pemberdayaan masyarakat, dimana Pemerintah Nagari Sungai Tarab masih belum berhasil sepenuhnya melaksanakan program pemberdayaan dikarenakan luas wilayah dan kekurangan tenaga penyuluh. Masyarakat membutuhkan adanya program kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan tentang dana desa dan respon masyarakat terhadap manfaat dana desa di Nagari Sungai Tarab. Pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Tarab masih mengalami beberapa kendala seperti terlambatnya musyawarah perencanaan pembangunan ditambah dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri, program kegiatan lebih didominasi dengan pembangunan fisik, swadaya masyarakat yang kurang terhadap pembangunan yang sudah dibuat,

serta sumber daya manusia yang kurang memahami penggunaan dana desa.

Terkait dengan respon masyarakat terhadap manfaat dana desa di Nagari Sungai Tarab, dimana masyarakat merasa terbantu dengan adanya infrastruktur yang mempermudah akses keluar masuk kampung dan aktifitas sehari-hari masyarakat secara umum seperti pembuatan irigasi sawah, pembuatan jalan usaha tani, pencoran dan pendaman jalan. Namun berbanding terbalik dengan bidang pemberdayaan masyarakat, dimana Pemerintah Nagari masih belum berhasil sepenuhnya melaksanakan program pemberdayaan dikarenakan luas wilayah dan kekurangan tenaga penyuluh. Masyarakat membutuhkan adanya program kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat)
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarto, Djoko (1985). Beberapa pengertian tentang Perencanaan Fisik. Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- Muljana, B.S. 2001. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI
- Susantyo, 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembnagunan

Pembesaan, telaah atas tulisan David C. Korten. Jurnal Sosio Informa Vol 12 No. 3

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah